

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara kategori berkembang menyadari bahwa pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan dan mengusahakan segala upaya untuk menekannya dalam agenda tahunan pemerintah. Bahkan menjadi *masterplan* perencanaan pembangunan dalam jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut Elvis Purba, Juliana dan Dame Esther “Masalah kemiskinan bukanlah hal baru, karna telah timbul sejak lama dan keadaan miskin itu merupakan sesuatu masalah yang akan selalu ada dan terus ada diberbagai Negara termasuk Indonesia”.¹

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang tidak pernah luput dari perhatian pemerintah, suatu negara dibelahan dunia manapun. Kemiskinan bahkan menjadi persoalan fenomenal dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasilan pemerintah negara dari waktu ke waktu, terlebih pada negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk kategori berkembang menyadari bahwa pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan dan mengusahakan segala upaya untuk menekannya dalam agenda tahunan pemerintah. Bahkan menjadi *masterplan* perencanaan pembangunan dalam jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Jika berbicara tentang kemiskinan tentu akan berbicara mengenai pembangunan, mengingat *term* ini adalah dua sumbu yang tak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dan terus-

¹ Elvis Purba, Juliana dan Dame esther, **Ekonomi Indonesia**, edisi kedua, Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2012, hal: 74.

menerus untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Tujuan pembangunan nasional negara Indonesia sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Berbagai kegiatan pembangunan telah dilaksanakan pemerintah Indonesia demi tercapainya kesejahteraan umum.

Masyarakat dapat disebut sejahtera apabila masyarakat tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara yang menyangkut kesejahteraan masyarakat adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesejahteraan dapat diartikan salah satunya dengan tingkat kemiskinan penduduk, kesejahteraan sendiri mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan, semakin rendah tingkat kemiskinan maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk. Salah satu akar permasalahan kemiskinan yaitu jumlah penduduk yang tinggi, angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2010-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
2010	31.020.000
2011	30.020.000
2012	29.130.000
2013	28.070.000
2014	28.280.000
2015	28.590.000
2016	27.760.000
2017	26.580.000

Sumber :Badan Pusat Statistik 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010-2013 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2014-2015 kembali meningkat, namun pada tahun 2016-2017 kembali turun. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah penduduk miskin. Salah satunya adalah angka kelahiran yang tinggi, menyebabkan meningkatnya permintaan barang dan jasa sehingga terjadi inflasi. Hal ini akan menimbulkan ketidakmampuan sisi ekonomi penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan seperti beras, gula pasir, telur ayam ras, dan lainnya. Tumbuhnya jumlah penduduk akan menurunkan tingkat upah dan memperendah biaya produksi. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus berproduksi. Tetapi keadaan ini hanya sementara sifatnya, sebab permintaan efektif (*effective demand*) akan semakin berkurang karena pendapatan buruh juga semakin berkurang. Dan hal ini juga tidak terlepas dari segala upaya dan kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui program penanggulangan kemiskinan yang anggarannya selalu naik tiap tahun.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2010-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2010	241.613.126
2011	244.808.254
2012	248.037.853
2013	251.268.276
2014	254.454.778
2015	257.563.815
2016	257.912.349
2017	261.890.900

Sumber :Badan Pusat Statistik 2018

Terlihat pada Tabel 1.2, dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2010 jumlah penduduk sebesar 241.613.126 jiwa.

Perkembangan penduduk itu terjadi karena beberapa faktor, yaitu: tingkat angka kelahiran, tingkat angka kematian, dan tingkat perpindahan penduduk (migrasi). kemudian 3 tahun berikutnya tahun 2013 jumlah penduduk sebesar 251.268.276 jiwa, 3 tahun kemudian tahun 2016 jumlah penduduk sebesar 257.912.349 jiwa, berlanjut pada tahun 2017 total jumlah penduduk Indonesia berjumlah 261.890.900 jiwa. Jumlah penduduk selama periode tersebut mengalami peningkatan. Dengan demikian Indonesia menempati posisi ke-4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia.

Akar permasalahan kemiskinan kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggi, adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja yang tercipta tersebut, sehingga terciptalah pengangguran yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Menurut Sadono Sukirno “Dalam perekonomian yang tingkat penganggurannya tinggi masyarakat seringkali melakukan demonstrasi dan mengemukakan kritik ke atas pemimpin-pemimpin pemerintah. Hal-hal seperti itu akan menimbulkan halangan untuk melakukan investasi dan mengembangkan kegiatan ekonomi”.²

Tabel 1.3 Jumlah Pengangguran di Indonesia Tahun 2010-2017

Tahun	Pengangguran Terbuka (jiwa)
2010	8.590.000
2011	8.120.000
2012	7.610.000
2013	7.170.000
2014	7.150.000

²Sadono, S. **Makro Ekonomi Teori Pengantar**, edisi ketiga Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Hal: 333.

2015	7.450.000
2016	8.590.000
2017	8.120.000

Sumber : *Badan Pusat Statistik 2018*

Terlihat pada Tabel 1.3 pengangguran di Indonesia tahun 2010-2017 bahwa pengangguran selalu ada perubahan baik kenaikan maupun penurunan. Namun, secara umum pengangguran mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun yang menciptakan tenaga kerja baru. Pengangguran timbul karena ketersediaan lapangan kerja yang terbatas dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Penumpukan jumlah angkatan kerja juga tentu akan memberikan beban tambahan bagi perekonomian suatu negara apabila tidak disertai dengan perluasan dan penciptaan lapangan kerjanya. Jika lowongan kerja baru tidak bisa menampung semua angkatan kerja baru maka akan memperpanjang barisan pengangguran yang sudah ada. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika pengangguran dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Kemiskinan sebagai masalah berskala nasional selalu dihadapi setiap pemerintahan. Kemiskinan terjadi dari akumulasi berbagai persoalan dan melibatkan banyak dimensi pokok. Menurut Rusdarti dan Lesta karolina, kemiskinan memiliki empat dimensi pokok, yaitu: kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*), rendahnya kemampuan (*low of capabilities*), kurangnya jaminan (*low level of security*), ketidakberdayaan (*low of capacity or empowerment*).³

Upaya pengentasan kemiskinan menjadi salah satu obyek tanggung jawab pemerintah. Permasalahan kemiskinan menuntut adanya campur tangan pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah diharapkan permasalahan kemiskinan dapat ditanggulangi. Campur tangan pemerintah lebih kurang sudah sering masyarakat dengar dan rasakan baik dalam

³Rusdarti dan Lesta Karolina Sebyang. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah**, *Jurnal Economia*, Volume 9, Nomor 1, 2013, Hal:1

tingkat nasional maupun daerah, contoh dalam setiap kampanye pemilihan umum selalu tersodor rencana program penanggulangan kemiskinan, dalam realisasinya pun sudah pernah ada bantuan langsung tunai/ sementara, BOS dalam bidang pendidikan, asuransi kesehatan masyarakat miskin, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), raskin (beras miskin), dan lainnya. Dalam undang-undang dasar tahun 1945 Pasal 27 sendiri sudah diamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab terhadap masalah kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah masalah kemiskinan yang dialami oleh setiap warga negaranya. Wujud konkrit dari adanya campur tangan pemerintah yaitu dengan adanya komponen pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi, dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata.

Tabel 1.4 Pengeluaran pemerintah Indonesia Tahun 2010-2017

Tahun	Pengeluaran pemerintah (US dollar)
2010	68.003.138.200
2011	80.891.188.808
2012	84.891.845.511
2013	86.851.491.925

2014	83.959.519.785
2015	84.062.114.025
2016	133.678.736.334
2017	154.577.737.334

Sumber : *Badan Pusat Statistik 2018*

Pada Tabel 1.4 dari data delapan tahun terakhir, dapat dilihat perkembangan pengeluaran pemerintah yang terus meningkat. Pada tahun 2011 pengeluaran pemerintah sebesar 80.891.188.808 US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 26.17 persen. dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 68.003.138.200 US dollar. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan yaitu sebesar 86.851.491.925 US dollar dan pada tahun 2014 kembali turun sebesar 83.959.519.785 US dollar. Kemudian pada tahun 2015 sampai 2017 terjadi kenaikan secara terus menerus pada pengeluaran pemerintah yaitu sebesar 133.678.736.334 US dollar pada tahun 2016 dan 154.577.737.334 US dollar 2017 dari tahun sebelumnya yaitu 84.062.114.025 US dollar pada tahun 2015. Pada umumnya pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu negara/wilayah. Keadaan ini dapat dijelaskan dalam kaidah yang dikenal sebagai Hukum Wagner yaitu mengenai adanya korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pendapatan nasional. Walaupun demikian peningkatan pengeluaran pemerintah yang besar belum tentu berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian, untuk itu perlu dilihat efisiensi penggunaan pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, penulis merasa tertarik untuk menganalisis bagaimana pengaruh **“Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2000-2017”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi bahwa kemiskinan menjadi masalah diberbagai negara, terlebih lagi di negara berkembang seperti Indonesia.

1. Kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain akan menimbulkan efek ke arah kemiskinan.
2. Tingkat menurunnya kualitas kemakmuran dalam masyarakat karena pengangguran akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan.
3. Kemiskinan terjadi dari akumulasi berbagai persoalan dan melibatkan banyak dimensi pokok yang membutuhkan campur tangan pemerintah.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2000-2017 ?
2. Bagaimanakah pengaruh jumlah pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2000-2017 ?
3. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2000-2017 ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2000-2017.
2. Mengetahui pengaruh jumlah pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2000-2017.

3. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesiaperiode 2000-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya.
 - c. Sebagai salah satu sumber informasi tentang permasalahan perkembangan kemiskinan di Indonesia.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan
 - b. sebagai tambahan untuk memperoleh gambaran mengenai jumlah penduduk, pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan kemiskinan serta melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Defenisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

2.1.2 Bentuk Kemiskinan

Menurut beberapa ahli. Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk yaitu:

- 1. Kemiskinan absolut adalah suatu konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan tetapi pada ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimum dimaksud Antara lain sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.**
- 2. Kemiskinan relatif adalah suatu konsep yang mengacu pada garis kemiskinan yang sebenarnya merupakan suatu ukuran mengenai ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kondisi ini di sebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan**

3. Kemiskinan kultural adalah suatu konsep yang mengacu pada persolan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh factor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros dan tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan stuktural adalah suatu konsep kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya. Kemiskinan ini terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan social politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi sering kali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
2. Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.⁴

2.1.3 Penyebab Kemiskinan

Fenomena kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multi dimensional (bersegi banyak), yang tidak semata-mata berkaitan dengan aspek kesejahteraan (*welfare*) dalam arti material.

Beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut :

1. *Policy induces processes* yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, yang dihasilkan melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*). Sebagai contoh adalah kebijakan yang katanya "antikemiskinan, akan tetapi kenyataannya bukan mengurangi kemiskinan tetapi justru melestarikannya
2. *Socio-economic dualism* yaitu gambaran kemiskinan yang diwariskan penjajah berupa dualism social-ekonomi. Petani di bekas negara jajahan, misalnya, menjadi termarginalkan karena tanah yang paling subur telah dikuasai oleh petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. *Population growth* yang menganggap bahwa kemiskinan disebabkan oleh pertambahan penduduk yang pesat. Hal ini sejalan dengan teori Malthus yang menyatakan bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedang pertambahan pangan seperti deret hitung. Perbedaan pertumbuhan tersebut akan menyebabkan pada suatu ketika masyarakat akan semakin miskin
4. *Resources management and the environment* dimana kemiskinan terjadi karena adanya unsur salah urus (*mismanagement*) sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang yang menyebabkan penurunan produktivitas lahan. Akibat selanjutnya adalah masyarakat tani bisa menjadi miskin
5. *Natural cycle and processes* dimana kemiskinan terjadi karena siklus alam. Bertempat tinggal di lahan kritis adalah berbahaya dan kurang beruntung Ketika

⁴ Elvis F. Purba, Dkk, *Op.Cit.* hal: 75-76.

musim hujan akan terjadi banjir dan ketika musim kemarau akan kekurangan air. Akibatnya tidak mungkin produktivitasnya maksimal dan dapat didayagunakan secara terus-menerus.

6. *The marginalization of woman* yaitu pemarginalan kaum perempuan karena mereka masih dianggap sebagai golongan kelas dua. Sehubungan dengan itu akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan kepada mereka lebih rendah dibandingkan dengan kepada laki-laki.
7. *Cultural and ethnic factors* yaitu faktor budaya dan etnik yang turut bekerja memelihara kemiskinan. Contohnya adalah pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
8. *Exploitative intermediation* yaitu "perantara yang eksploitatif yang tetap memiskinkan. Misalnya keberadaan rentenir (lintah darat) yang nampaknya sebagai penolong akan tetapi menjadi penodong. Masyarakat yang ditolungnya akan tetap terjerat dalam kemiskinan.
9. *Internal political fragmentation and civil stratfe* yaitu suatu Kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat yang pada gilirannya dapat menjadi penyebab kemiskinan.
10. *International Processes* terkait dengan bekerjanya sistem-sistem nasional (kolonialisme dan kapitalisme) yang membuat banyak Negara menjadi miskin.⁵

2.1.4 Potret Kemiskinan di Indonesia

Keberhasilan pembangunan pada awalnya dilihat dari kemampuan suatu negara untuk meningkatkan pendapatan nasional perkapita penduduknya. Strategi pembangunan di Indonesia mempunyai hakekat pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia secara merata di seluruh tanah air. Pembangunan tersebut bukan hanya untuk suatu golongan atau sebagian masyarakat tetapi untuk seluruh masyarakat sebagai upaya perbaikan hidup yang berkeadilan sosial. Sesungguhnya pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia selama masa Orde Baru ditujukan antara lain untuk mengentaskan kemiskinan walaupun dalam dua Pelita (Pelita I dan Pelita II) lebih berorientasi pada pertumbuhan (*GNP oriented*) Harapan akan berhasil untuk mengentaskan kemiskinan dalam masa itu dilatarbelakangi pemikiran akan mekanisme rembesan (penetes) ke bawah (*trickle down effect*) bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi harapan tersebut ternyata tidak membawa hasil sebagaimana diidam-idamkan karena

⁵ *Ibid*, hal 78-79

banyak hambatan yang menyebabkan mekanismenya tidak dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itulah strategi pembangunan masih perlu diarahkan untuk memerangi kemiskinan, karena salah satu musuh besar pembangunan bangsa.

Pakar ekonom biasanya mengaitkan kemiskinan dengan ketidak mampuan ekonomi atau pendapatan seseorang (rumahtangga) untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian definisi kemiskinan biasanya berkuat sekitar ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan, baik yang mencakup material maupun non material dalam konteks kebutuhan pokok. Pengertian serupa itu sebenarnya lebih bersifat relatif karna menyangkut kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar yang berbeda antara seseorang dengan orang lain. Konsep kebutuhan dasar di Indonesia sebenarnya baru berlangsung pada Pelita III. Konsep ini sebenarnya bertitiktolak dari kegagalan konsep pertumbuhan tradisional yang juga dialami oleh berbagai negara di dunia.

Unsur kebutuhan dasar meliputi lima sasaran pokok menurut Wie dalam buku Elvis. F. Purba menyebutkan bahwa:

Pertama, kebutuhan konsumsi perorangan seperti sandang, pangan, dan pemukiman. Kedua, penyediaan jasa umum seperti fasilitas kesehatan pendidikan saluran air minum, pengangkutan dan kebudayaan. Ketiga hak atas pekerjaan produktif. Keempat prasarana yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kelima, partisipasi penduduk dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pemenuhan kebutuhan dasar.⁶

Kemiskinan adalah salah satu masalah pokok dalam pembangunan di Indonesia sehingga harus diperangi dan dikurangi. Paling sedikit terdapat tiga alasan penting untuk menangulangnya. Pertama, kemiskinan merupakan kondisi yang kurang beruntung karena bagi kaum miskin akses terhadap perubahan politik dan kelembagaan sangat terbatas. Kedua, kemiskinan merupakan kondisi yang cenderung menjerumuskan orang miskin kedalam tindak

⁶Ibid, hal: 87.

kriminalitas. Ketiga, bagi para pembuat kebijaksanaan, kemiskinan itu sendiri juga mencerminkan kegagalan kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil pada masa lampau.

2.1.2 Ciri-Ciri Kemiskinan

Kemiskinan dapat terjadi karena keterbatasan faktor-faktor geografis (daerahnya terpencil atau terisolasi, dan terbatasnya prasarana dan sarana), ekologi (keadaan sumber daya tanah/lahandan air serta cuaca yang tidak mendukung), teknologi (kesederhanaan sistem teknologi untuk berproduksi), dan pertumbuhan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan tingkat penghasilannya.

Adapun ciri-ciri kemiskinan menurut Salim dalam buku Elvis F. Purba menjelaskan bahwa :

- 1. Mereka tidak memiliki faktor produksi seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan.**
- 2. Mereka yang tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset kapita produktif dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha sedangkan untuk memperoleh kredit perbankan tidak memenuhi syarat karena tidak mampu menunjukkan jaminan kredit**
- 3. Mereka yang tingkat pendidikannya adalah rendah. Waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan tidak mempunyai kesempatan untuk belajar. Hal yang sama juga terjadi bagi anak-anak mereka karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan**
- 4. Umumnya mereka tinggal di perdesaaan dan banyak diantara mereka yang tidak memiliki tanah, dan walaupun ada sempit sekali. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai buruh tani atau pekerja kasar dan karena jenis pekerjaannya tidak terus-menerus maka banyak diantaranya pindah dan menjadi tinggal di kota lah walaupun tidak memiliki pendidikan dan keterampilan**
- 5. Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja), dan**
- 6. Selain di perdesaan, banyak juga yang berada di daerah kumuh perkotaan (slum area).⁷**

⁷ **Ibid**, hal: 84-85.

2.2 Jumlah Penduduk

2.2.1 Definisi Jumlah Penduduk

Pada dasarnya Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia menjabarkan “penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”.⁸

Menurut Elvis F. Purba , Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang cepatakan mengakibatkan masalah social ekonomi, yaitu:

- 1. Keluarga yang jumlah tanggungannya besar tentulah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Tidak tertutup kemungkinan keluarga seperti itu akan mengorbankan sekolah satu, dua atau lebih anak-anaknya demi memenuhi kebutuhan pokok mereka akan sandang dan pangan.**
- 2. Kebutuhan perumahan atau tempat tinggal semakin mendesak, karena sudah merupakan tuntutan zaman bahwa keluarga membutuhkan suatu tempat tinggal yang layak, yang memenuhi syarat kesehatan dan lingkungan..**
- 3. Dapat menyebabkan pendapatan per kapita yang semakin kecil seiring dengan bertambah banyaknya anggota keluarga yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan keluarga.⁹**

2.2.2 Peranan Penduduk

Penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi; satu dari segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan

⁸BPS, **Kependudukan**: <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>

⁹Elvis F. Purba, Juliana dan Dame Esther **Op.Cit.** hal: 51-52.

ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan.

Menurut Todaro “kenaikan jumlah penduduk yang cepat cenderung menurunkan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita di sebagian negara-negara berkembang, terutama yang kondisi dasarnya masih miskin, tergantung pada sektor pertanian, serta diliputi keterbatasan lahan serta sumber-sumber daya alam”.¹⁰ Jadi penambahan penduduk dengan tingkat penghasilan rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi. Bagi negara-negara berkembang keadaan perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Karena akan selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan *output* dengan tingkat perkembangan penduduk, yang akhirnya akan dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Jadi, karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka paling tidak terdapat kesulitan memperoleh kesempatan kerja. Jika mereka tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur, maka justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah. Penduduk yang selalu berkembang menuntut adanya perkembangan ekonomi yang terus-menerus. Semua ini memerlukan lebih banyak investasi. Bagi negara berkembang, cepatnya perkembangan penduduk menjadi sebuah ganjalan dalam perkembangan ekonomi, karena negara-negara ini memiliki sedikit kapital.

M. Todaro menyatakan bahwa, “jika penduduk terus bertambah, maka bertambah pula jumlah mulut yang harus disuapi, penyediaan bahan pangan secara memadai menjadi lebih sulit jika penduduk terus bertambah dengan pesatnya”.¹¹ Pertumbuhan penduduk juga menghalangi prospek tercapainya kehidupan yang lebih baik karena mengurangi tabungan rumah tangga dan juga negara. Di samping itu, jumlah penduduk yang terlampau besar akan menguras kas

¹⁰ Michael, P Todaro, **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, Edisi Kedelapan, Jakarta: Erlangga 2003, hal: 326.

¹¹ **Ibid**, hal: 326.

pemerintah yang sudah sangat terbatas untuk menyediakan berbagai pelayanan kesehatan, ekonomi dan sosial bagi generasi baru.

2.2 Pengangguran

2.2.1 Pengertian Pengangguran

Menurut Sadono Sukirno “Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya”.¹² Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Dari tahun ketahun pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan. Apalagi di era globalisasi ini persaingan tenaga kerja semakin ketat terutama karena dibukanya perdagangan bebas yang memudahkan penawaran tenaga kerja asing yang diyakini lebih berkualitas masuk ke dalam negeri. Pada masa sekarang usaha-usaha mengurangi pengangguran adalah dengan menggunakan rencana pembangunan ekonomi yang menyertakan rencana ketenagakerjaan secara matang. Di samping itu, disertai pula kesadaran akan ketenagakerjaan yang lebih demokratis menyangkut hak-hak memilih pekerjaan, lapangan pekerjaan, lokasi pekerjaan sesuai kemampuan, kemauan tenaga kerja tanpa diskriminasi.

Sadono Sukirno juga mengungkapkan bahwa pengangguran biasanya dibedakan atas empat jenis berdasarkan keadaan yang meyebabkannya, antara lain:

¹² Sadono S. **Makro Ekonomi Modern**, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal: 472.

1. Pengangguran friksional, apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik.
2. Pengangguran siklikal, pengangguran tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di Negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemudian ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka penganggur akan bertambah.
3. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran karena kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerja diberhentikan.
4. Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya.¹³

Sedangkan bentuk-bentuk pengangguran berdasarkan cirinya dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pengangguran Terbuka, pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan.
2. Pengangguran Tersembunyi, pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien.
3. Pengangguran Bermusim, pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya.
4. Setengah Menganggur, di Negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari.¹⁴

¹³ Sadono S. *Op.Cit.* hal: 328-329.

¹⁴ *Ibid*, hal: 330-331.

2.3.2 Dampak Pengangguran

Pengangguran yang terjadi dalam suatu perekonomian dapat memiliki dampak atau akibat buruk baik terhadap perekonomian maupun individu dan masyarakat. Salah satu dampak buruk pengangguran terhadap perekonomian yaitu menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Sedangkan salah satu dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat yaitu pengangguran dapat menyebabkan kehilangan mata percaharian dan pendapatan. Di negara-negara maju, para pengangguran memperoleh tunjangan (bantuan keuangan) dari badan asuransi pengangguran. Oleh sebab itu, mereka masih mempunyai pendapatan untuk membiayai kehidupannya dan keluarganya.

2.3.3 Hubungan Pengangguran terhadap Kemiskinan

Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Apabila pengangguran di suatu negara adalah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

2.3 Pengeluaran Pemerintah

2.3.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, karena kegiatan pemerintah dibiayai dengan pengeluaran pemerintah. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung banyak faktor antara lain proyeksi jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin

dicapai, serta pertimbangan politik dan keamanan sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah pada suatu periode tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya tidak didasarkan pada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional.

2.4.2 Teori-Teori Pengeluaran Pemerintah

Ada beberapa pakar ekonom yang mengemukakan teori-teori tentang pengeluaran pemerintah, berikut adalah beberapa teori tentang pengeluaran pemerintah:

1. Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar.

Sebenarnya peranan pemerintah tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

2. Hukum Wagner

Adolf Wagner mengemukakan dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan Per Kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner menjelaskan

peranan pemerintah yang semakin besar karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PkPP1}{PPK1} < \frac{PkPP2}{PPK2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPKn}$$

Keterangan:

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2, ...n : jangka waktu (tahun)

Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut *Organic theory of the state* yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara. Mereka percaya bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka memiliki kesediaan untuk membayar pajak.

Menurut mereka perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP (*Gross Domestic Product*) menyebabkan penerimaan pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalkan karena ada perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluaran untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga harus meningkat, dan pemerintah meningkatkan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang.

4. Teori Batas Kritis Colin Clark

Colin Clark menyatakan bahwa toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah dengan kata lain sektor pemerintah diperkirakan $\pm 25\%$ GNP. Meskipun anggaran pemerintah seimbang, jika batas 25% GNP terlewati maka akan terjadi inflasi dan kekacauan ekonomi. Soetrisno berpendapat bahwa, Kekacauan ekonomi disebabkan karena batas toleransi masyarakat menahan inflasi dan membayar pajak yang melebihi batas kritis tersebut.

2.4.3 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Menurut M Suparmoko dan Furtasan pengeluaran negara dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu :

- 1. Pengeluaran yang “*self-liquidating*” sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan Negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.**

2. Pengeluaran yang *reproduktif*, artinya pengeluaran yang mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak lain yang pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat dan sebagainya.
3. Pengeluaran yang “*tidak self-liquidatin*” maupun dan “ *tidak reproduktif*” yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat, misalnya pengeluaran untuk bidang-bidang rekreasi, pendirian monument, objek-objek tourisme dan sebagainya. Dalam hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya pendapatan nasional melalui penjualan jasa-jasa tadi.
4. Pengeluaran yang *secara langsung tidak produktif* dan merupakan *pemborosan* misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik.
5. Pengeluaran yang merupakan *penghematan dimasa yang akan datang* misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka dimasa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar.¹⁵

M Suparmoko dan Furtasan menyebutkan sebab-sebab pengeluaran pemerintah yaitu

1. Adanya perang dan pergolakan dalam masyarakat
2. Kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat
3. Ada urbanisasi yang membarengi perkembangan ekonomi
4. Perkembangan demokrasi
5. Pemborosan dan korupsi
6. Pembangunan ekonomi
7. Program kesejahteraan sosial
8. Perubahan iklim¹⁶

Sejak tahun 2005 mulai ditetapkan penyatuan anggaran antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan serta pengklasifikasian anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, organisasi dan fungsi. Klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain (Postur APBN Indonesia).

2.4.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan

¹⁵M. Suparmoko dan H. Furtasan, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, Bogor : In Media, 2014, hal : 41

¹⁶*ibid*, hal: 24-27.

Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan, sesuai dengan peranan pemerintah yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Peranan tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi jika tujuan pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan ingin terselesaikan. Menurut Guritno Mangkoesoebroto “Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut”.¹⁷ Anggaran yang dikeluarkan untuk pengentasan kemiskinan menjadi stimulus dalam menurunkan angka kemiskinan dan beberapa persoalan pembangunan yang lain.

Menurut Sadono Sukirno:

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung banyak faktor. Salah satunya adalah jumlah pajak yang diterima. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi suatu Negara.¹⁸

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsidan jenis belanja.¹⁹ Pengelompokkan belanja negara menurut fungsi menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sejak tahun 2005 mulai ditetapkan penyatuan anggaran antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan serta pengklasifikasian anggaran belanja pemerintah pusat menurut

¹⁷Guritno Mangkoesoebroto, **Ekonomi Publik**, edisi tiga, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta tahun 1994, hal: 169.

¹⁸ Sadono S, **Op.Cit.** hal: 168.

¹⁹Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, **Tentang Keuangan Negara**, pasal 11 nomor 5.

jenis belanja, organisasi dan fungsi. Klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain (Postur APBN Indonesia).

2.4.5 Peran Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Secara umum pengeluaran pemerintah memiliki 4 peran yaitu:

1. Peran alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi sehingga terjadi optimalisasi dalam pemanfaatan dan efisiensi dalam produksi.
2. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil, wajar dan merata ke setiap daerah.
3. Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan mengembalikan perekonomian dalam keseimbangan jika terjadi *disequilibrium*.
4. Peran Dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Keempat macam peranan pemerintahan tadi potensial menimbulkan kesulitan penyerasian atau bahkan pertentangan kebijakan. Contohnya dalam kapasitas selaku stabilisator, pemerintah harus mengendalikan inflasi. Apabila hal itu ditempuh dengan cara mengurangi pengeluarannya, agar permintaan agregat terkendali sehingga tidak tambah memicu kenaikan harga-harga, maka porsi pengeluaran pemerintah untuk lapisan masyarakat atau pihak atau sektor

yang harus dibantu dapat turut dikurangi. Padahal justru dengan pengeluaran itulah pemerintah dapat menjalankan distributifnya.

2.5 Peneliti Terdahulu

Berikut akan dikemukakan beberapa peneliti yang dianggap dapat memperkaya analisis ini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Restu Ratri Astuti dalam skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2004 – 2012”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *Random Effec Model* (REM).

“ Hasil dari penelitian ini adalah Jumlah penduduk di Indonesia tahun 2004 – 2012 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Dengan bertambahnya jumlah penduduk sebagai pemacu pembangunan sehingga akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan akan turun.”²⁰

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fathul Mufid Cholili dalam skripsi dengan judul “Analisis pengaruh pengangguran, (PDRB), dan (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)”. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi berganda (*Multiple Regression*). “ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan”.²¹

Penelitian Estomihi Hutabarat dan D.Sriyono dalam jurnal dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi Terhadap kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2013).” Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *common effect model* (CEM).

²⁰ Restu Ratri Astuti, **Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Pertumbuhan Ekonomi Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2004 – 2012**, Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, Hal 60 (Skripsi Tidak diterbitkan).

²¹ Fathul Mufid Cholili, **Analisis Pengaruh Pengangguran, (PDRB), dan (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 provinsi di Indonesia)**, jurnal ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2016.

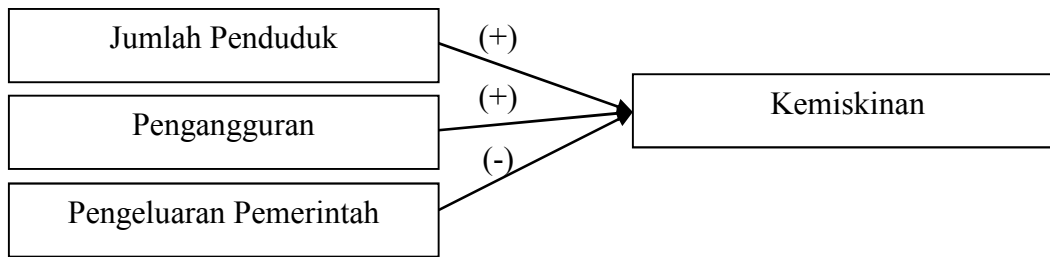
“Hasil dari penelitian ini adalah Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur.”²²

2.6 Kerangka Konseptual

Dalam mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah dituntut untuk aktif dalam upaya penurunan jumlah penduduk miskin. Upaya yang diharapkan tidak hanya sekedar memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, akan tetapi juga upaya untuk memerangi kemiskinan dari akar masalahnya. Dalam penelitian ini Jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah dijadikan variabel-variabel bebas yang secara parsial diduga mempengaruhi jumlah penduduk miskin Indonesia.

Menurut Elvis F.Purba “jumlah penduduk mempengaruhi tingkat kemiskinan apabila jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhannya yang tinggi akan memperkecil pendapatan perkapita, sehingga kualitas kehidupan menjadi berkurang yang mengarah pada kemiskinan”. Menurut Sadono sukirno “Pengangguran mempengaruhi tingkat kemiskinan disebabkan karena produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga masyarakat harus mengurangi konsumsinya yang berefek kepada menjauh dari kesejahteraan dan beransur-ansur menuju kemiskinan”. Menurut G.Mangkoesubroto “Pengeluaran pemerintah mempengaruhi kemiskinan disebabkan perannya dalam ekonomi yang dapat membantu masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan yang pro dan dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan”.

²²Estomihi Hutabarat dan D.Sriyono, **Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi Terhadap kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2013)**, program studi ekonomi pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya yogyakarta.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian yang masih perlu diuji dan dibuktikan secara empiris tingkat kebenarannya dengan menggunakan data-data yang berhubungan. Berdasarkan landasan teori di atas, penelitian yang relevan dan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2000-2017.
2. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2000-2017.
3. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2000-2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena mengacu pada perhitungan analisis data penelitian yang berupa angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan. Berdasarkan sumber datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.

Data utama yang diperlukan adalah semua variabel yang diteliti meliputi kemiskinan, jumlah penduduk, pengangguran, pengeluaran pemerintah. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat sehingga dalam penelitian ini terdapat variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dinyatakan dengan satuan angka-angka. Data kuantitatif disini berupa data runtut waktu (*timeseries*) selama periode 2000-2017. Berdasarkan cara memperolehnya, data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder dalam

penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Analisa Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan karena dalam penelitian ini mencakup lebih dari dua variabel (termasuk variabel terikat Y), dimana dalam regresi linier berganda variable terikat Y tergantung pada dua atau lebih variabel bebas. Model regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \dots + \beta_n X_{nt} + e_t$$

Teknik analisis dalam penelitian ini sesuai dengan variabel-variabel yang digunakan dalam model persamaan regresi linier berganda pada judul. Mencermati judul tersebut maka penelitian menggunakan data *time series* dan jenis data tahunan. Model persamaann penelitian ini menggunakan Log karena data yang digunakan memiliki besaran yang bervariasi, sehingga perlu disetarakan. Model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Log}Y_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_{1t} + \beta_2 \text{Log}X_{2t} + \beta_3 \text{Log}X_{3t} + e_t$$

Dimana :

Y_t : Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode t (jiwa)

β_0 : konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi

X_{1t} : Jumlah penduduk di Indonesia pada periode t (jiwa)

X_{2t} : Pengangguran terbuka di Indonesia pada periode t (jiwa)

X_{3t} : Pengeluaran pemerintah pada periode t (US Dollar)

e_t : variabel pengganggu

3.4.2 Uji Statistik

Uji statistik dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing koefisien dari variabel-variabel bebas baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap variabel terikat yaitu dengan menggunakan uji secara parsial (uji-t), uji serentak (uji-F) dan koefisien determinasi (R^2).

a. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui signifikansi dari masing-masing variabel telah ditetapkan kriteria hipotesis sebagai berikut :

1. Hipotesis Jumlah penduduk

$H_0 : \hat{\beta}_1 = 0$, artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di indonesia.

$H_1 : \hat{\beta}_1 \neq 0$, artinya jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di indonesia.

2. Hipotesis Pengangguran

$H_0 : \hat{\beta}_2 = 0$, artinya Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di indonesia.

$H_1 : \hat{\beta}_2 \neq 0$, artinya Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di indonesia.

3. Hipotesis Pengeluaran Pemerintah

$H_0 : \hat{\beta}_3 = 0$, artinya Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

$H_1 : \hat{\beta}_3 \neq 0$, artinya Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Adapun kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

1. Jika probabilitas (signifikan) $< \alpha = 0,05$, dimana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Jika probabilitas (signifikan) $> \alpha = 0,05$, dimana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama atau secara simultan terhadap kemiskinan. Dalam pengujian ini telah dirumuskan sebagai berikut:

1. $H_0 : \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3 = 0$, berarti secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. $H_0 : \text{salah satu atau semua } \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3 \neq 0$, berarti secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Adapun kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika probabilitas (signifikan) $< \alpha = 0,05$, dimana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

2. Jika probabilitas (signifikan) $> \alpha = 0,05$, dimana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur total variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh seluruh variabel bebas. Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai R^2 mendekati satu maka kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variasi variabel terikat adalah besar.
2. Apabila nilai R^2 mendekati nol maka kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variasi variabel terikat adalah kecil.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Tujuan dari pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Uji Multikolinieritas

Menurut Agus Widarjono “multikolinearitas adalah hubungan linier antara variabelindependen di dalam regresi berganda”.²³ Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) di antara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran :

²³Agus Widarjono, **Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya**, Edisi 4, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2013, hal: 101.

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran
- d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), bila nilai $VIF < 10$ maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinearitas, namun bila sebaliknya $VIF > 10$ maka dianggap ada pelanggaran multikolinearitas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinearitas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Bila nilai matriks $> 0,95$ maka kolinearitasnya serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai matriks $< 0,95$ maka kolinearitas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dengan menggunakan regresi parsial. Cara ini diperoleh dengan membandingkan nilai R^2 pada regresi model utama. Jika R^2 lebih besar dari pada nilai R^2 pada model utama maka terdapat multikolinearitas.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara galat (kesalahan pengganggu, *disturbance error*) pada periode waktu t dengan galat pada periode waktu $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu dengan uji Durbin Watson (uji $D - W$).

“Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak

ada variabel lag di antara variabel independen”.²⁴ Uji Durbin-Watson dirumuskan sebagai berikut:

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis d_l dan d_u dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai α . Secara umum bisa diambil patokan:

1. Angka D - W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D - W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
3. Angka D - W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

Apabila dalam uji D – W tidak berkorelasi maka ditambahkan uji lainnya salah satunya adalah uji Run.

3. Uji Run

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dalam model yang digunakan dapat juga digunakan uji Run. Uji Run merupakan bagian dari statistika nonparametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau random. ”Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis)”.²⁵ Cara yang digunakan dalam uji Run adalah sebagai berikut :

H_0 : Galat (res_1) random (acak)

H_1 : Galat (res_1) tidak random

3. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah nilai variabel pengganggu dari model yang dibentuk sudah normal atau tidak. Konsep pengujian normalitas menggunakan pendekatan Jarque-Berra test. Pedoman dari J-B test adalah sebagai berikut:

²⁴ H.Imam Gozali, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23**, Edisi 8, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2013, hal: 108.

²⁵ **ibid**, hal: 116.

- a. Apabila nilai probabilitas J-B hitung < nilai probabilitas α (0.05), maka hipotesis menyatakan bahwa variabel pengganggu adalah berdistribusi normal ditolak.
- b. Apabila nilai probabilitas J-B hitung > nilai probabilitas α (0.05), maka hipotesis menyatakan bahwa variabel pengganggu adalah berdistribusi normal diterima.

Menurut Ghozali "uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S)".²⁶ Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

- c. H_0 : Data galat (residu) menyebar normal
- d. H_1 : Data galat tidak menyebar normal.

3.4 Definisi Operasional Variabel

1. Kemiskinan (Y)

Kemiskinan dalam penelitian ini digambarkan menggunakan jumlah penduduk miskin yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan dalam satuan jiwa.

2. Jumlah Penduduk (X₁)

Penduduk dalam penelitian ini merujuk pada semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap dalam satuan jiwa.

3. Pengangguran (X₂)

²⁶Ibid, hal: 158.

Pengangguran dalam penelitian ini merujuk pada orang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan dalam satuan jiwa.

4. Pengeluaran Pemerintah (X_3)

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya pemerintahan dengan cara menentukan besarnya pengeluaran atau belanja pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN dalam satuan US Dollar.